

**ANALISA KINERJA PADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2016 – 2020
PERFORMANCE ANALYSIS IN WEST JAVA PROVINCE GOVERNMENT
FINANCIAL YEAR 2016 - 2020**

Oleh:

Nurah Haerani¹, Agus Munandar²

Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul Jakarta
AH2, RT.1/RW.2, Duri Kupa, Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 11510

e-mail: tetehyayang@gmail.com

Sejarah Artikel: Diterima April 2022, Disetujui Mei 2022, Dipublikasikan Juni 2022

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemprov Jawa Barat periode tahun 2016 sampai dengan periode tahun 2020. Analisis kinerja keuangan dilakukan berdasarkan analisis rasio keuangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mendokumentasikan pengumpulan, penghitungan dan pengolahan data sekunder dari laporan RAPBN dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemprov Jawa Barat. Analisis menggunakan metode kuantitatif dengan rasio keuangan. Berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data, kinerja keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa rata-rata Rasio kemandirian 57,66%, rata-rata Rasio efektifitas 99,82% masih dalam kriteria efektif sedangkan untuk rasio efisiensi, nilai rata-rata 101,93% tergolong tidak efisien dimana pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan biaya lebih besar dibandingkan pendapatan yang diterimanya, rasio beban operasi berada di atas rasio investasi dimana pemprov Jawa Barat kurang memprioritaskan pada belanja modal tapi lebih fokus untuk belanja operasi.

Kata Kunci: Rasio Kemandirian, Efektifitas, aktivitas, Pertumbuhan

ABSTRACT

This study was conducted to analyze the financial performance of the West Java Provincial Government for the period 2016 to 2020. Financial performance analysis was carried out based on financial ratio analysis. The data collection method used is to document the collection, calculation, and processing of secondary data from the RAPBN report and the realization of the West Java Provincial Government's revenue and expenditure budget. The analysis uses quantitative methods with financial ratios. Based on the results of data analysis and processing, the financial performance of the West Java Province government shows that the average independence ratio is 57.66%, the average effectiveness ratio is 99.82% is still within the effective criteria, while the efficiency ratio, the average value is 101.93 % is classified as inefficient where the West Java provincial government has spent more than the income it receives, the operating expense ratio is above the investment ratio where the West Java provincial government prioritizes capital expenditures less but focuses more on operating costs.

Keywords: Performance Analysis, Government of West Java Province

PENDAHULUAN

Bersumber pada perundang-undangan dengan nomor 23 yang terbit pada tahun 2014, yang membahas tentang pemerintahan di daerah, menyatakan bahwa sistem desentralisasi

atau Otonomi suatu daerah dapat memberikan kewenangan daerah untuk menyelenggarakan urusan sendiri secara mandiri tanpa campur tangan dari pemerintahan pusat. Dengan demikian tujuan dari otonomi yang utama akan

tercapai yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar menjadi lebih baik, transparan, efektif, efisien dan demokratis. Disamping itu otonomi daerah memberikan kewenangan dan keleluasaan dalam hal penataan sumber-sumber daya yang ada di daerah

Permendagri No.21 Tahun 2011 memberikan acuan atas pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, yang disertai dengan pedoman pada tata dan kelola anggaran pendapatan dan belanja daerah. Keberadaan regulasi yang mengaturnya, baik yang bersumber dari undang-undang maupun aturan lain, masih dianggap sulit untuk diimplementasikan akibat adanya regulasi yang tertunda penegakannya, dan regulasi tersebut membutuhkan waktu untuk dipelajari dan dipahami. (Ami Karina Dan Dephy Noeryni 2016)

Anggaran Penerimaan dan Belanja suatu Daerah (APBD) merupakan kemampuan dari setiap Pemerintahan daerah dalam mendanai setiap pembangunan di daerahnya. Untuk dapat mengukur kemampuan dari pemerintah daerah, maka diperlukan sebuah standar laporan yang akan menentukan suatu daerah berada dalam kondisi mandiri, efektif, efisien dan akuntabel (Bastian 2019). Pengukuran terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah sebagai salah satu acuan perlu dilakukan untuk memutuskan suatu kebijakan keuangan pada periode tahun anggaran berikutnya. Skala/Rasio : Efektifitas, Efisiensi, Kemandirian, Aktifitas, dan Pertumbuhan adalah suatu analisa yang dapat digunakan sebagai parameter atas kinerja Pemerintah daerah (Halim dan Kusufi 2017). Analisa kinerja menjadi alat yang penting sebagai pedoman dalam rangka perbaikan kinerja ke depannya, Analisa kinerja juga menjadi sebuah target pencapaian kinerja dari yang telah ditetapkan sebelumnya, serta berfungsi sebagai alat monitoring dan bahan evaluasi terhadap kinerja.

Sebagai bahan untuk melakukan analisa kinerja dibutuhkan informasi dari Laporan Keuangan, hal ini dilakukan dengan tujuan agar memberikan pemahaman memadai terhadap data

keuangan yang disajikan. Serta dapat dilakukan penafsiran terhadap nilai yang tercantum di dalamnya sehingga informasi keuangan yang tersedia dapat menjadi acuan yang berguna untuk pengambilan keputusan (Indra Bastian 2006)

Dengan adanya otonomi daerah, maka Pemprov Jawa Barat harus bisa mengoptimalkan objek yang menjadi sumber pendapatan bagi daerah, diantaranya adalah PAD yaitu pajak yang dipungut dari masyarakat, pendapatan pajak daerah, penerimaan yang berasal badan usaha milik daerah/BUMD dan penerimaan lainnya asli daerah tersebut. Demikian pula pada sisi belanja, Pemprov Jawa Barat harus bisa merencanakan program-program yang menjadi kewenangannya. Untuk itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus bisa membuat anggaran belanja daerah dengan mempertimbangkan sumber pendanaan untuk anggaran belanja tersebut. Kemampuan daerah dalam rangka mengelola APBD merupakan salah satu unsur penting dalam rangka menilai kinerja Keuangan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut maka dibuat rumusan suatu masalah dengan menerapkan analisis menggunakan rasio/skala: kemandirian, keefektifan dan efisiensi PAD, Aktivitas, dan pertumbuhan untuk periode tahun 2016 sampai dengan periode tahun 2020.

Provinsi Jawa Barat mempunyai potensi “sumber daya manusia” yang tinggi sehingga menjadi daya tarik tersendiri untuk mendatangkan pemilik modal di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, trend kinerja ekonomi yang positif pada periode 2018 menjadikan Jawa Barat mampu mencatatkan tingkat perekonomian yang tinggi, dimana pertumbuhan perekonomian di wilayah Jawa Barat mencapai 5,29 % atau levelnya berada di atas LPE nasional dengan tingkat inflasi yang terkendali. Ada 3 sektor utama yang menopang perekonomian Provinsi Jawa Barat, yaitu sektor industri, pertanian dan perdagangan (Perwakilan, Indonesia, dan Jawa 2020).

Tabel 1:

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu 2016 -2020

NO	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
A	PENDAPATAN	27.694.035.120	32.163.957.645	33.919.022.031	36.037.894.762	34.504.275.705
1	Pendapatan Asli daerah	17.042.895.114	18.081.123.740	19.642.915.448	21.244.266.598	18.521.882.178
2	Pendapatan Transfer	10.627.671.443	13.988.945.314	14.241.750.403	14.757.951.841	15.910.828.461
3	Lain-lain Pendapatan yang sah	23.468.56	93.888.591	34.356.180	35.676.323	71.565.066
B.	BELANJA	27.621.964.466	32.706.749.484	33.333.824.961	35.833.086.126	38.127.531.747
1	Belanja Operasi	14.729.006.075	19.321.448.551	18.981.038.247	19.907.453.301	21.066.529.850
2	Belanja Modal	2.859.355.623	2.311.616.145	3.145.847.260	2.530.347.542	1.672.906.514
3	Belanja Tak Terduga	19.884	47.817	184.163	-	3.154.919.548
4	Transfer/Bantuan Keuangan	10.033.582.884	11.073.636.971	11.206.755.291	13.395.285.283	12.233.175.835
	SURPLUS/ (DEFISIT)	72.070.654	(542.791.839)	585.197.070	204.808.636	(3.623.256.042)

Sumber: <https://jabarprov.go.id/> (Data diolah)

Kesimpulan pada Tabel.1 terdapat peningkatan realisasi pada perhitungan pendapatan dan realisasi belanja dari pemprov Jawa Barat, meskipun pada periode tahun 2020 telah terjadi penurunan pendapatan yang mengakibatkan defisit anggaran senilai Rp 3.623.256.042. Komponen pendapatan daerah Provinsi di Jawa Barat bersumber dari Penerimaan Asli Daerahnya (PAD), juga penerimaan lainnya, merupakan penerimaan yang sah. Adapun komponen dari pembelanjaan daerah terdiri atas pembelanjaan modal dan operasi. Alokasi pada pengeluaran dari pembelanjaan operasi lebih besar apabila dibanding dengan pembelanjaan pokok/modal. Pada setiap tahunnya Realisasi belanja operasi dan belanja modal cenderung mengalami peningkatan.

Penelitian yang dilakukan mempunyai tema Analisis atas kemampuan Keuangan Pemprov Provinsi Jawa Barat. Perbandingan sebelumnya adalah penilaian kinerja perusahaan menggunakan metode analisis rasio keuangan khususnya rasio profitabilitas. Metode analisis rasio keuangan khususnya rasio profitabilitas yaitu Net Profit Margin, Return on Asset, dan Return on Equity dengan metode Economic Value Added (EVA), sedangkan analisis aktifitas Keuangan merupakan suatu proses perhitungan, mengenai pencapaian pada pelaksanaan atas kegiatan dalam bidang keuangan yang dilakukan oleh pengelola Daerah di Provinsi Jawa Barat, untuk periode tahun 2016 hingga periode tahun 2020. Komponen Skala/Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala/Rasio: Efektifitas, Efisiensi, Kemandirian, Aktivitas, dan Pertumbuhan.

Berdasarkan Peraturan pemerintah No. 8/2006, berhubungan uraian data keuangan serta Kinerja pada Instansi Pemerintah, yang tercantum pada pada Bab 3 Psl 5 disebutkan Komponen dari Uraian data keuangan Pemerintah Pusat/daerah terdiri atas:

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yaitu mencatat perbandingan: anggaran dan realisasinya pada periode tertentu. Laporan Realisasi anggaran menyajikan ringkasan atas pengelolaan sumber-sumber dana yang ada, pengalokasian dana dan penggunaan sumber daya ekonomi lainnya.
- Neraca atau balance sheet merupakan laporan yang menggambarkan posisi terkait asset tetap dan asset lainnya, kewajiban atau hutang dan ekuitas periode tertentu
- Pelaporan Arus Kas, menyediakan informasi yang dibutuhkan atas sumber dana yang ada, penggunaan dan perubahan posisi kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
- Catatan Atas Laporan keuangan (CaLK) memberikan penjelasan terhadap nilai pos-pos keuangan yang tercantum pada Uraian data keuangan. Di dalamnya meliputi informasi-informasi penting yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan oleh lingkungan pelaporan agar penyajian nilai yang tercantum pada LK dapat difahami oleh penggunanya untuk tujuan evaluasi dan pengambilan keputusan penting lainnya.

Kinerja Keuangan Pemerintah daerah

Ada 3 Tujuan yang harus dipenuhi dalam rangka pengukuran kinerja untuk sektor publik yaitu:

1. Pengukuran kinerja dapat membantu untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pemerintah
2. Pengukuran Kinerja dapat mengoptimalkan setiap sumber daya yang dimiliki dan sebagai landasan bagi pengambilan keputusan
3. Pengukuran Kinerja bertujuan untuk memperbaiki pola komunikasi kelembagaan dan mewujudkan pertanggungjawaban publik (Mardiasmo 2009).

Kinerja keuangan pemerintah daerah yang jujur, terbuka, efektif, efisien, demokratis dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi salah satu ukuran kesanggupan Pemda dalam menjalankan otonomi daerahnya. Menurut Mahmudi pengukuran pada kinerja keuangan daerah yang didasarkan pada data keuangan APBD dilakukan melalui analisis rasio antara lain:

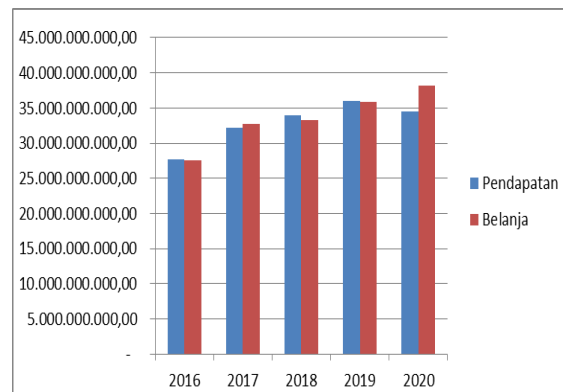
- a. Skala/Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) Tingkat otonomi suatu wilayah dapat dilihat berdasarkan perbandingan antara PAD dengan Total Pendapatan Daerah yang berasal dari pihak luar, antara lain bantuan dari pusat maupun bantuan dari daerah lain. Jika nilai pada rasio PAD lebih besar daripada rasio dana transfer mengindikasikan daerah tersebut semakin otonom dan sebaliknya apabila nilai rasionya kecil berarti mengindikasikan semakin tinggi tingkat ketergantungan daerah tersebut terhadap pusat ((Halim dan Kusufi 2017))
- b. Rasio efektivitas menggambarkan kesanggupan dari Pemda dalam merealisasikan PAD diperbandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan daerah tersebut. Nilai skala/rasio yang mencapai minimal 1 atau 100% dinyatakan efektif. Sebaliknya apabila nilai skala/rasio tidak mencapai nilai 100% dinyatakan kurang efektif.
- c. Rasio efisiensi merupakan perimbangan antara jumlah beban yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan, dengan realisasi pendapatan yang diterima. Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterima perlu dihitung dengan cermat, sehingga dapat diketahui tingkat efisiensi dari kegiatan pemungutan pendapatann tersebut. Pemerintah daerah dapat menghasilkan pendapatan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan, tetapi jika ternyata biaya yang terkait dengan pencapaian pendapatan lebih tinggi daripada pendapatan yang benar-benar diterima, maka hal ini menyebabkan

suatu kegiatan yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Jika skala/rasio yang dicapai kurang dari 1 atau kurang dari 100%, Pemerintah daerah dianggap efisien dalam meningkatkan pendapatannya dan sebaliknya apabila nilai rasionya lebih kecil dari 1 atau 100% dianggap efisien.

- d. Rasio Aktivitas / Keserasian menjelaskan besarnya pengalokasian dana yang menjadi prioritas pemerintah daerah. Semakin besar presentase alokasi dana belanja operasi, berarti semakin kecil persentase untuk belanja modal yang disediakan untuk pemenuhan fasilitas umum bagi masyarakat daerah tersebut.
- e. Rasio Pertumbuhan Dengan rasio pertumbuhan (growth Ratio) dapat dilihat kemampuan dari Pemda dalam mempertahankan atau meningkatkan nilai rasio pendapatannya, diperbandingkan dengan pencapaian di periode sebelumnya. Nilainya baik apabila di setiap tahunnya rasio mengalami peningkatan maupun pertumbuhan yang positif dibandingkan dengan periode sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Laporan Realisasi 2016 - 2020 menjadi objek penelitian yang akan di analisis dalam penelitian ini. Adapun data yang digunakan berupa data sekunder yang berasal dari Laporan Keuangan audited BPK. Data sekunder yang dikumpulkan diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Jawa Barat periode 2016 sampai dengan periode 2020. Data uraian data keuangan yang digunakan berupa : Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk periode tahun 2016 sampai dengan periode tahun 2020, beserta dengan data yang berasal dari sumber lain sebagai data dukung untuk melakukan analisa kinerja keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam analisis ini dilakukan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, pencatatan, perhitungan atau pengolahan angka angka yang berasal dari data sekunder beserta data dukung lain yang berhubungan. Metoda analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yang merupakan konsep perhitungan atas Rasio keuangan yang bersumber dari pos-pos RAPBN, dan realisasi anggaran yang tertuang dalam laporan realisasi anggaran periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020.



Gambar 1:

Rasio keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020. [https://jabarprov.go.id/\(Informasi diolah\)](https://jabarprov.go.id/(Informasi%20diolah))
Sumber: [https://jabarprov.go.id/\(Informasi diolah\)](https://jabarprov.go.id/(Informasi%20diolah))

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Jawa Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki banyak potensi daerah yang dapat diberdayakan baik dari segi potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dimilikinya. Dengan Ibu kotanya Bandung, Jawa Barat dengan luas wilayah daratan 3.710.061,32 hektare di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Banten, serta berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Jawa Tengah. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat merupakan proses penilaian kemajuan realisasi operasi/kegiatan Pemerintah Jawa Barat di bidang keuangan antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, yang meliputi. Rasio Efektifitas, Rasio

Efisiensi, Rasio Kemandirian, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Dengan menilai Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) akan dapat dilihat kemampuan dari pemerintah daerah untuk dapat menjadi mandiri dalam hal pembiayaan kegiatan pemerintahannya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat luas sebagai objek pajak dan retribusi. Perbandingan PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan bahwa kemandirian daerah dari bantuan luar baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya menunjukkan pemerintah daerah sudah mandiri, begitu pula sebaliknya berarti tingkat ketergantungan yang tinggi.

Tabel 2. Rasio Kemandirian

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 2: Rasio Kemandirian

Kemampuan Daerah	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan	Keterangan
Rendah Sekali	0-25	<i>Instruktif</i>	Peran Pemerintah Pusat Dominan
Rendah	25-50	<i>Konsultif</i>	Campur tangan Pemerintah Pusat mulai berkurang
Sedang	50-75	<i>Partisipatif</i>	Mulai mampu melaksanakan otonomi daerah
Tinggi	75-100	<i>Delegatif</i>	Tidak ada campur tangan Pusat, karena mandiri dalam otonomi daerah

Sumber: LRA Pemprov Jabar (Data diolah)

Apabila dilihat dari tabel 2 dan grafik di atas dapat kita ketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat periode 2016 sampai 2020 secara berturut-turut adalah sebesar 61,54%, 56,22%, 57,91%, 58,95%, dan 53,68%. Jadi dalam 5 tahun nilai rata-ratanya adalah sebesar 57,66% yang dapat diinterpretasikan sebagai pola

kemandirian Partisipatif dengan tingkat kemampuan daerah adalah sedang yang artinya Provinsi Jawa Barat mulai mampu untuk melakukan otonomi daerah.

b. Rasio Efektifitas Pendapatan

Rumus yang digunakan untuk mengukur rasio efektifitas pendapatan sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektivitas Total Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Total Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 3: Rasio Efektivitas Pendapatan

Efektifitas Keuangan daerah	Kriteria
Di atas 100 %	Sangat Efektif
90 %-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
Di bawah 60 %	Tidak efektif

Sumber: LRA Pemprov Jabar (Data diolah)

Mencermati tabel 3 di atas, kita dapat mengetahui bahwa rasio efektivitas Total Pendapatan dalam kurun waktu 2016-2020 secara berturut – turut adalah sebesar 104,54%, 102,53%, 101,97%, 99,75% dan 90,29%. Berdasarkan Penilaian Efektivitas Keuangan Daerah, kinerja keuangan daerah Provinsi Jawa Barat pada umumnya memiliki tingkat efektivitas keuangan daerah yang melebihi 100% untuk tahun 2016 sampai 2018 kinerja keuangan Provinsi Jawa Barat termasuk kedalam kategori sangat Efektif dalam merealisasikan sumber Pendapatan, walaupun

dalam 2 tahun terakhir yaitu untuk tahun 2019 dan 2020 mengalami. Penurunan yang disebabkan karena menurunnya Pendapatan Asli daerah pada kurun waktu tersebut. Namun secara rata-rata selama kurun waktu 2016-2020 Rasio efektivitas Total pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 99,82% yang masih dalam kriteria Efektif.

c. Rasio Efisiensi

Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Keuangan Daerah} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja}}{\text{Total Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 4: Rasio Efisiensi

Efisiensi Keuangan daerah	Kriteria
Di atas 100 %	Tidak Efisien
90 %-100%	Kurang Efisien
80-90%	Cukup Efisien
60-80%	Efisien
Di bawah 60 %	Sangat Efisien

Sumber: LRA Pemprov Jabar (Data diolah)

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa rasio efisiensi belanja daerah terhadap pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat periode tahun 2016 –2020 adalah.99,74%, 101,69%, 98,27%, 99,43%, dan 110.50%. Berdasarkan pedoman penilaian efisiensi pada tahun 2016, 2018 dan 2019 kinerja keuangan Jawa Barat berada pada interval 90% - 100% yang berarti menunjukkan kinerja yang kurang efisien. Sedangkan pada tahun 2017 dan 2020 kinerja keuangan Jawa Barat tidak efisien karena berada pada interval $\geq 100\%$. Hal ini menunjukkan bahwa Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melakukan pemungutan pendapatannya dapat

dikategorikan kurang efisien, dimana pengeluaran biaya dalam rangka memperoleh pendapatan lebih banyak dibandingkan besarnya pendapatan yang diterima.

d. Rasio Aktivitas

Alokasi dana pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal dapat menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memberikan prioritas kepada pembelanjaan operasi dan modal. Skala / Rasio Aktivitas Belanja Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat pada periode Tahun 2016 hingga periode tahun 2020 ditunjukkan pada rumus berikut:

Rasio Belanja Operasi

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja}}{\text{Total Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

(Sumber: LRA Pemprov Jabar (Data diolah))

Rasio Belanja Modal

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

(Sumber: LRA Pemprov Jabar (Data diolah))

Sesuai dengan hasil perhitungan rasio aktivitas di atas dapat dilihat bahwa selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat memberikan alokasi dana yang besar untuk belanja operasi sehingga rasio belanja modal terhadap total belanja masih sangat rendah. Secara rata-rata selama periode 5 tahun, skala/rasio Belanja Operasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 56,3% lebih tinggi dibandingkan Rata-rata Rasio Belanja Modal

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan rasio aktivitas Pemerintah Provinsi Jawa Barat memprioritaskan pada belanja operasi daripada belanja modal. Untuk itu perlu adanya penghematan Belanja Pegawai oleh Pemerintah

Provinsi Jawa Barat yang dialokasikan untuk belanja modal dan kepentingan masyarakat, berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

e. Rasio Pertumbuhan

Merupakan tolok ukur atas kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan pendapatan dari waktu ke waktu. Dengan kriteria jika rasio pertumbuhan positif dari tahun ke tahun, maka dikatakan pemerintah daerah telah berhasil dalam pengelolaan keuangannya.

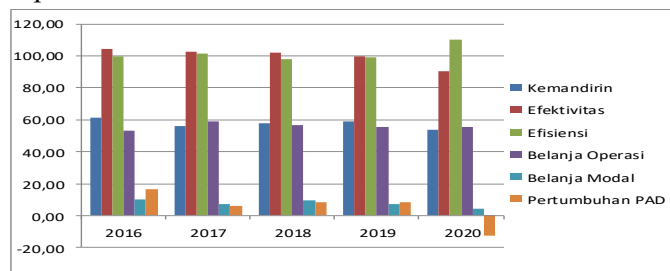
Rasio Pertumbuhan

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } x_n - x_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD } x_{n-1}} \times 100\%$$

(Sumber: LRA Pemprov Jabar (Data diolah))

Dari perhitungan di atas dapat dilihat Jawa Barat pada tahun anggaran 2016–2020 menunjukkan pertumbuhan PAD negatif. Ada kecenderungan Pendapatan Asli Daerah Jawa Barat mengalami penurunan yang disebabkan pada menurunnya pendapatan dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Bila dicermati dari hasil perhitungan untuk tahun anggaran 2017 dan 2020 Pendapatan Asli Daerah

mengalami penurunan pada sektor pajak daerah. Sedangkan di tahun 2016 Pendapatan Asli Daerah juga mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 16.60% , namun tahun 2020 terjadi pertumbuhan pendapatan yang paling rendah sebesar -12,81%. Secara keseluruhan Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih perlu melakukan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerahnya.



Gambar 2:

Grafik Summary Rasio Keuangan Provinsi Jawa Barat tahun 2016- 2020

Sumber: LRA Pemprov Jabar (Data diolah)

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan perhitungan yang telah dilakukan, dapat menyimpulkan Kinerja keuangan Pemerintah Jawa Barat untuk periode tahun 2016 hingga periode tahun 2020 menunjukkan penurunan namun secara keseluruhan kinerja keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa dikatakan telah cukup baik.

- a. Nilai rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah Provinsi Jawa Barat periode anggaran 2016-2020 adalah sebesar 57,66% yang menginterpretasikan pola kemandirian Partisipatif dengan tingkat kemampuan daerah adalah sedang yang artinya Provinsi Jawa Barat mulai mampu untuk melakukan otonomi daerah.
- b. Untuk rasio efektifitas kinerja keuangan daerah Provinsi Jawa Barat pada umumnya memiliki tingkat efektifitas keuangan daerah melewati 100% untuk tahun 2016 sampai 2020 yang berarti menyatakan kinerja keuangan Provinsi Jawa Barat termasuk kedalam kategori sangat Efektif dalam merealisasikan sumber Pendapatan
- c. Nilai rata-rata rasio efisiensi Tahun Anggaran 2016 - 2020 mencapai nilai 101,93% nilai ini tergolong pada kriteria belum efisien, dimana pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan biaya lebih besar dibandingkan pendapatan yang diterima. Sehingga hal ini memberikan gambaran bahwa kinerja pengelolaan keuangan provinsi Jawa Barat menunjukkan hasil yang masih harus ditingkatkan kembali.
- d. Hasil perhitungan rata-rata rasio aktivitas untuk belanja operasi dan belanja modal, menunjukkan bahwa pemerintah provinsi Jawa Barat kurang memprioritaskan pada belanja modal tapi lebih fokus untuk belanja operasi.
- e. Dari analisis rasio pertumbuhan Pendapatan diatas dapat diketahui bahwa kinerja pengelolaan keuangan Jawa Barat perlu ditingkatkan, karena Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum mampu mendongkrak pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dengan rasio pertumbuhan pendapatan yang lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Akibat wabah pandemi Covid 19, mengakibatkan pendapatan daerah

mengalami penurunan. Baik penerimaan berupa pajak merupakan penyumbang terbesar dalam struktur anggaran pemerintah Jawa Barat. Penerimaan Pemerintah Jawa Barat pada tahun 2020 lebih kecil dari tahun sebelumnya, penyebabnya karena adanya kebijakan insentif pajak untuk sektor-sektor yang terkena dampak COVID-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Ami Karina Dan Dephy Noeryni. 2016. "Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Dki Jakarta." 7 Agustus 13 (1)(2):13.
- Bastian, Indra. 2019. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*.
- Halim, Abdul, dan Syamsul Kusufi. 2017. *Aplikasi Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*.
- Indra Bastian, Ph. D. 2006. *Lingkup Akuntansi Sektor Publik*.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta*. Vol. 21.
- Perwakilan, Kepala, Bank Indonesia, dan Provinsi Jawa. 2020. "Dampak COVID-19 Terhadap Perekonomian Jawa Barat Herawanto." *Bank Indonesia*.